

**PENTINGNYA PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM MEWUJUDKAN
MASYARAKAT SIPIL (*Civil Society*)
Oleh: Sigit Dwi Kusrahmadi**

Abstrak

Kehidupan demokrasi di Indonesia belum seperti yang diharapkan, banyak timbul persoalan-persoalan yang menyangkut pelanggaran HAM, nilai egalitarian belum tersosialisasikan, kebenaran diputar balikkan dan terjadi mafia peradilan. Kondisi bangsa semakin terpuruk, pejabat mementingkan dirinya sendiri, timbul kelompok-kelompok partisan yang sulit dikontrol pemerintah dan reformasi tidak memberi perubahan yang signifikan untuk kemakmuran rakyat, segala hal carut-marut yang bersumber dalam kehidupan yang tidak demokratis.

Dalam kondisi di atas sangat diperlukan pendidikan demokrasi yang diharapkan dapat memberikan solusi pemecahan segala persoalan berbangsa dan bernegara sekaligus memberi pencerahan dengan adanya partisipasi masyarakat secara nyata.

Pendahuluan

Secara esensial pendidikan demokrasi adalah untuk melahirkan "budaya demokrasi baru " dalam kerangka untuk mewujudkan tatanan demokrasi yang ideal. Demokrasi tidak sekedar dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat atau keterlibatan langsung rakyat dalam mengambil keputusan politik, namun lebih dari itu. Demokrasi di dalamnya menyangkut kondisi yang kondusif untuk mensosialisasikan pendidikan nilai-nilai yang menjadi harapan dan dambaan. Oleh karena itu demokrasi tidak hanya merujuk pada kondisi realitas tatanan atau sistem yang sudah ada, pendidikan demokrasi harus mampu melakukan inovasi-inovasi yang baru untuk kemajuan demokrasi. Pendidikan demokrasi dalam arti lebih spesifik dapat diartikan sebagai usaha secara sadar untuk mengubah proses sosialisasi demokrasi dalam masyarakat sehingga mereka betul-betul memahami sistem demokrasi yang ideal dan hendak diwujudkan (Nasiwan, 24: 6).

Menurut Sosolog Universitas Erlangga, Hotman M Siahaan kultur demokrasi bagi bangsa Indonesia belum terbangun sehingga pemerintah harus berani mengambil

trobosan melalui pendidikan demokrasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya aksi buruh atau protes mahasiswa yang berakhir dengan bentrokan fisik.

Diskursus demokrasi tidak muncul, pada hal semestinya demokrasi menciptakan konsensus dialog antara pemerintah dan rakyat. Namun wacana itu tidak muncul meskipun pemerintah telah berusaha mewujudkannya. Kondisi ini diperparah dengan berbagai kebijakan yang tidak memihak pada kepentingan rakyat seperti kenaikan harga bahan bakar minyak.. Pemerintah harus berani bersikap tegas dan cepat untuk menyelamatkan krisis ekonomi serta membangun kebijakan yang komperhensif demi kepentingan pengembangan demokrasi di Indonesia (Kompas, 3 Maret 2006).

Kebijakan pemerintah tidak demokratis yang berorientasi pada kepentingan penguasa sudah tentu berdampak pada gejala terjadinya konflik, ketidak jujuran, rendahnya budaya malu, KKN, bahkan pada nasionalisme yang rendah. Kebijakan demokrasi harus memiliki nilai manfaat, keadilan dan kebebasan, kemakmuran bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu rekayasa sosial dalam bentuk kebijakan dalam membentuk watak bangsa melalui pendidikan demokrasi.

Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi pada hakekatnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Dalam pendidikan demokrasi ada dua hal yang harus ditekankan, demokrasi sebagai konsep dan demokrasi sebagai praksis. Sebagai konsep berbicara mengenai arti, makna dan sikap perilaku yang tergolong demokratis, sedang sebagai praksis sesungguhnya demokrasi

sudah menjadi sistem. Sebagai suatu sistem kinerja demokrasi terikat suatu peraturan main tertentu, apabila dalam sistem itu ada orang yang tidak mentaati aturan main yang telah disepakati bersama, maka aktivitas itu akan merusak demokrasi dan menjadi anti demokrasi (Sunarso, 2004: 3). Tugas seorang pendidik adalah mensosialisasikan dua tataran tersebut dalam konsep dan fraksisnya, sehingga peserta didik memahami dan ikut terlibat dalam kehidupan demokrasi.

Dalam mensosialisasikan nilai demokrasi perlu adanya komitmen para elit politik, tokoh masyarakat, guru, *stake holders* pendidikan demokrasi, dan seluruh masyarakat. Sosialisasi Pendidikan demokrasi harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain:

“Pendidikan demokrasi adalah suatu proses, pendekatan yang digunakan secara komprehensif, pendidikan ini hendaknya dilakukan secara kondusif baik di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat, semua partisan dan komunitas terlibat di dalamnya. Pelatihan pendidikan demokrasi perlu diadakan bagi kepala sekolah, guru-guru, murid-murid, orang tua murid, dan komunitas pemimpin yang merupakan esensial utama. Perlu perhatian terhadap latar belakang murid yang terlibat dalam proses kehidupan demokrasi. Perhatian demokrasi harus berlangsung cukup lama, dan pembelajaran demokrasi harus diintegrasikan dalam kurikulum secara praksis di sekolah dan masyarakat (Setyo Raharjo, 2002; 28).

Pendidikan demokrasi harus direncanakan secara matang oleh *stake holders* baik para pakar demokrasi sebagai *think-thank*, kepala sekolah, guru-guru, orang tua murid, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pendidikan demokrasi ini harus memperhatikan nilai-nilai secara holistik dan universal. Keberhasilan pendidikan demokrasi dengan keluaran menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi personal dan kompetensi sosial yang demokratis dan dinamis sehingga menghasilkan warga negara yang baik (*good citezen*).

Dalam mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi pemimpin formal dan non formal bertanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan demokrasi baik ranah organisasi negara (*state*), organisasi masyarakat (*civil state*), ranah istitusi dunia usaha (*market institution*). Semua pejabat negara, pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab menjadikan jabatannya sebagai media pembelajaran pendidikan demokrasi (Jimly Assiddiqie, 2006; 1).

Dalam mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi diperlukan pendekar, pejuang demokrasi seperti Gandhi, Mandela, Martin Luther King, Jr. yang tidak pernah gentar, putus asa atau frustasi meskipun rintangan, halangan, lingkungan tidak kondusif, dan penjara menantinya. Dengan gagah berani meneriakkan sosialisasi pendidikan demokrasi untuk mewujudkan nilai equalitarian seperti kami kutip di bawah ini:

“We shall over come 2X We shall over come, someday O, deep in my heart I do believe, We shall over come someday, We walk hand in hand 2X We walk hand in hand someday O, deep in my heart I do believe We walk hand in hand someday. We shall live in peace 2X We shall live in peace someday O, deep in my heart I do believe We shall live in peace someday (Google, Refrensi Demokrasi, 2006).

Jadi nilai demokrasi harus dibawa seorang pakar yang meyakini kebenaran demokrasi sebagai ideologi ideal harus ditanamkan pada setiap hati (personal, individu) agar suatu hari nanti kehidupan demokrasi dan perdamaian akan terwujud.

Dengan adanya benih demokrasi yang sudah disemaikan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat diharapkan setiap personal dapat mempraktikkan demokrasi dalam totalitas kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Modal demokrasi yang sudah ada dalam personal merupakan lahan yang subur bagi generasi penerus untuk mewujudkan kehidupan bersama dalam mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*). Terlebih lagi dalam pembelajaran dan sosialisasi pendidikan demokrasi dapat dimanfaatkan konsep

learning to do, learning to be, learning to now, learning to live together. Apalagi apabila guru, orang tua murid, pemuka agama, pemuka masyarakat, elit politik, dan pejabat memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan konsep “*Ingarso sung tuladho, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani*” .

Konsep Masyarakat Sipil (*Civil Society*) Dalam Koridor Demokrasi

Civil Society atau masyarakat sipil dalam bahasan ilmu sosial dimaknai sebagai konsep yang berkaitan dan dipertentangkan dengan “masyarakat politik” yang secara umum dipahami sebagai negara. Konsep ini pertama kali timbul di Eropa Barat pada jaman *Enlightment*. Konsep masyarakat sipil dapat dilacak pemikiran tokoh humaniora seperti Hobbes, Locke, Montesquie, Rousseau. *Civil Society* dipahami sebagai kawasan privat yang dipertentangkan dengan kawasan publik. Pemikiran ini mengubah wacana *civil society* sebagai diskurs pemikiran kritis terhadap kapitalisme (Andi Mallarangeng, 200: 14). Sedang di Eropa Timur muncul dasawarsa 1980 an sebagai jawaban terhadap negara dengan sistem partai tunggal, dan kemudian menjalar ke Eropa Barat dengan konsep “negara kesejahteraan” (*Welfare State*). Negara-negara Amerika Latin, Afrika, Asia, Timur tengah telah menggunakan konsep *civil society* untuk mengekspresikan perjuangan demokratisasi dan melakukan perubahan politik di negaranya masing-masing.

Masyarakat sipil adalah masyarakat dimana hak dan kewajiban dihargai dan dijunjung tinggi, sehingga tercipta masyarakat yang damai, adil dan berbudaya dengan ciri-cirinya sebagai berikut:

“1. Mengakui keanekaragaman budaya yang merupakan pengembangan identitas bangsa, 2. Pentingnya saling pengertian antar sesama anggota masyarakat dan memiliki toleransi yang tinggi. 3. Perlunya lembaga sosialisasi nilai-nilai demokrasi dan kepastian hukum (Istiqomah, 2003; 10).

Prof. Dr. Udin SW menyatakan bahwa dalam demokrasi untuk mewujudkan masyarakat sipil berlaku adigium *“Democracy is not inherited but is learned”* . Demokrasi bukan hal yang diturunkan tetapi harus diajarkan. Oleh karena itu pendidikan demokrasi harus diajarkan kepada peserta didik. Perkembangan demokrasi di sebuah negara dipengaruhi oleh:

“1. Tingkat perkembangan ekonomi, 2. Kesadaran identitas nasional, 3. Pengalaman sejarah, 4. *Civic culture* (Udin, SW., 2006: 2).

Sedang menurut Denny dalam *“Terancamnya Konsolidasi Demokrasi”* ada tiga variabel utama dalam mewujudkan demokrasi:

“1. Pertumbuhan ekonomi, jika ekonomi suatu negara tidak tumbuh maka negara itu tidak akan mencapai demokrasi, 2. Variabel kedua yang mempengaruhi konsolidasi demokrasi adalah kultur liberal; yaitu nilai-nilai egalitarian terlepas dari isu SARA dan jender, 3. Kesepakatan elit, yaitu tentang kesepakatan aturan main dalam kehidupan politik (Denny, 2006: 16).

Apa yang terjadi di Indonesia ketiga variabel tersebut di atas sangat buruk, ekonomi mengalami krisis, kultur liberal tidak terjadi tetapi justru sebaliknya kultur intoleran dan kekerasan. Sementara itu dalam kehidupan politik tidak ada aturan main bersama yang disepakati. Melalui pendidikan demokrasi diharapkan menghasilkan fondasi politik yang kokoh dengan menghasilkan ekonomi yang tumbuh, kultur liberal dan kesepakatan elit dalam aturan main politik.

Negara demokrasi untuk mewujudkan masyarakat sipil perumusannya disesuaikan dengan tuntutan jaman. Oleh karena itu konsep *rule of law* (negara hukum)

yang direvisi ahli hukum internasional merumuskan pemerintah demokratis memiliki kriteria sebagai berikut:

“Perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas, pemilu yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan beroposisi, pendidikan kewarganegaraan, sedang nilai-nilai demokrasi yang harus ada menurut Mayo; penyelesaian konflik secara damai dan melembaga, menjamin perubahan secara damai, penyelenggaraan pergantian pemimpin secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan, mengaggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat dan menjamin tegaknya keadilan (Sunarso, 2004: 37).

Nilai-nilai tersebut di atas harus disosialisasikan melalui pendidikan formal di sekolah dasar khususnya bagi generasi penerus, dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara.

Penutup

Pemaknaan kehidupan berdemokrasi setelah 61 tahun merdeka tidak hanya merasa bangga dalam memiliki bangsa serta ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara , tetapi harus berorientasi baru antara lain membebaskan rakyat dari kemiskinan. Penguasaan ekonomi dan aset sumber kekayaan alam yang hanya dimiliki oleh segelintir orang harus segera diakhiri. Demokrasi ekonomi bukan hanya wacana omong kosong, jika bangsa ini masih terjajah di bidang ekonomi, banyak terjadi pengangguran, kemiskinan, ketimpangan ekonomi. Kehidupan demokrasi harus mampu memberi jawaban kepincangan dan ketertindasan dalam bidang ekonomi. Borok-borok korupsi, perampokan dalam negara karena kerakusan konglomerat dan penjajahan oleh bangsa sendiri merupakan ketidak adilan yang harus diberantas melalui pendidikan demokrasi sehingga kehidupan berbangsa semakin demokratis. Namun dalam kenyataannya borok-borok kehidupan yang tidak demokratis semakin mengganas,

menggorogoti urat nadi bangsa ini. Dalam teorinya norma-norma berbangsa harus dijadikan pedoman dan pandangan hidup, namun kenyataannya terjadi pengkianatan yang tidak demokratis.

Pendidikan demokrasi diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi personal dan sosial sehingga menjadi warga negara yang baik (*good care* atau *good citezen*) dengan ciri-cirinya antara lain: berani mengambil sikap positif untuk menegakkan pilar-pilar demokrasi demi masa depan bangsa yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan, persamaan, persaudaraan, kesatuan, kebangsaan, kebhinekaan, multikultural, nasionalisme, demokrasi dan demokratisasi.

Diberikannya pendidikan demokrasi pada generasi penerus merupakan salah satu alternatif solusi penyelesaian untuk mengantisipasi konflik-konflik yang terjadi di Indonesia dimasa mendatang. Dengan tersosialisasikan pendidikan demokrasi diharapkan generasi penerus dapat memahami, menganalisis, menjawab masalah-masalah yang dihadapi bangsa, dan dapat membangun kehidupan demokrasi secara berkesinambungan, konsisten berdasarkan cita-cita bangsa sehingga tujuan nasional bisa tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Mallarangeng, 2000. *Otonomi Daerah Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Forum Komunikasi Keluarga Rokan Hulu.
- Denny JA. 2006. *Demokrasi* “Terancamnya Konsolidasi Gemokrasi”. *Google*.
- Franz Magnis Suseno SJ. 2006. *Demokrasi*. “Maksud dan Makna Demokrasi”. *Google*.
- Ignas Kleden. 2003: *Demokrasi* “Drmokrasi dan Distorsiny: Politik Reformasi di Indonesia”. *Google*.

Jimly Assidiqie, 2006. Demokrasi “Pendidikan dan Pemasyarakatan UUD 1945”.
Google.

Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Fakultas Filsafat UGM.

Nasiwan, 2004. “Pendidikan Politik Bagi Para Pemilih Menyongsong Pemilu 2004,”
Informasi, Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial, No. I Tahun XXX,
2004.

Refrensi Demokrasi, “Catatan Tentang King & Surat dari Penjara Kota Birmingham”
2006. *Google.*

Surat Kabar

Zuhairi Misrawi, Rekonstruksi Keindonesian, *Kompas*, 30 Agustus 2006.

Biodata Penulis:

Sigit Dwi Kusrahmadi, lahir di Yogyakarta, 27 Juni 1957. menyelesaikan S-1 di Fakultas Sastra Jurusan Sejarah UGM, dan menyelesaikan S-2 Sospol Ketahanan Nasional UGM. Sejak tahun 1987 mengajar di MKU dan tahun 2003 pindah di D-2 PGSD FIP UNY.